

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amir Hamzah, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Masalah-Masalah Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

David Lechman, 1989, *Democracy and Development in Latin America*, Polity Press, Cambridge.

Dede Mariana, 2008, *Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung.

George Sorensen, 2003, *The Transformation of The State: Beyond the Myth of Retreat*, Macmillan Education, U.K.

Henry Champbell, 1995, *Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence*, The Lawbook Exchange, New Jersey.

Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, 1963, *Our Democracy at Work*, Prentice-Hall.Inc , USA.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)*, Setara Press, Malang.

Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimly Asshidiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel), 2013, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan*, Penelitian Kerjasama Kemitraan Kopel, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum, 2009, *Buku Saku Pemilu 2009*, KPU RI, Jakarta.

Maria Farida, 2012, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Mills, 2007, *Action research A Guide For The Teacher Researcher*, 3<sup>rd</sup> ed, Pearson Education, New Jersey, US.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Soehino, 2013, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sudarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku ke-V, Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Moh Kusrini dan Bintan R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Puslit IAIN, 2000, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta.

Ramlan Surbakti dkk., 2015, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. 2008, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Idea International, Stockholm.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Serentak*, Expose, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

### C. Jurnal

A. Ahsin Thohari, 2012, “Deklinasi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 4, Desember 2012.

Adhikari SP, Meng S, Wu YJ, dkk., “Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review”, *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, Vol. 9, No. 1, Maret, 2020.

Agustam, “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila daam Sistem Perpolitikan di Indonesia”, *Jurnal teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 7, No.12, Januari-Juli, 2011.

Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, *Jurnal Moderat*, Vol.5, No.3, Agustus, 2019.

Apristya Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No.2, November 2020.

Cholisin, “Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia”, *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2009.

Dwi Andayani Budisetyowati, “Menatap Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA) di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017”, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2017.

Eunha Shim, Tariq Amna, Wongyeong Choi, dkk., “Transmission Potential and Severity of COVID-19 in South Korea”, *International Journal of Infectious Diseases*, Vol. 93, April, 2020.

Farida Azzahra dan Aloysius Eka Kurnia, “Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Serentak Tahun 2020”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50, No. 2, 2020.

F. Ngongare, M. Pangkey, D. Tampongangoy, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Timur”, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 3, No. 15, 2015.

Harapan, Naoya Itoh, Amanda Yutika, dkk., “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review”, *Journal Infect Public Health*, Vol. 13, No. 5, Mei, 2020.

Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa”, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Katholik Parahyangan*, Vol. 3, No.2, 2012.

Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, Mei, 2012.

Jamil dan Dian Ferricha, “Penundaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease”, *Jurnal Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh edisi khusus*, Oktober 2020.

Kin Man Wan, Lawrence Ka Ki Ho, Natalie W.M. Wong, Andy Chiu, “Fighting Covid-19 in Hongkong: The Effects of Community and Mobilization”, *Elsevier Public Health Emergency Collection*, No. 134, Juni, 2020.

Marulak Pardede, “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, Juni 2018.

Mokhammad Abdul Aziz, “Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Demokratis Perspektif Pancasila

dan UUD 1945”, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2014.

Puspitasari Sri Hastuti, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi Universitas Islam Indonesia*, Vol.8, No.3, Juni, 2011.

Ratna Rosanti, “Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 10, No. 1, 2020.

Ratna Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Urgensitas Perppu Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Kala Wabah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Ria Casmi Arsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 3, September, 2014.

Richard Kennedy dan Bonaventura Suhendarto, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Siti Setiati dan Muhammad K. Azwar, “Covid-19 and Indonesia”, *Jurnal Acta Medica Indonesiana*, Vol. 52, No. 1, April, 2020.

Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2017.

Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, September, 2009.

Yan Rong Gui, Qing Dong Cao, Xhong Si Hong, dkk., “The Origin, Transmission, and Clinical Therapies on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak an Update on The Status”, *Military Medical Research*, Vol. 7, No. 11, Maret, 2020.

Yuanyuan Dong, Xi Mo, Yabin Hu, dkk., “Epidemiology of Covid-19 Among Children in China”, *American Academy of Pediatrics*”, Vol. 145, No. 6, Juni, 2020.

Zarkasi, “Tinjauan Yuridis Tugas dan Wewenang KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Vol. 4 No. 3, 2010.

Zulfirman, “Analisis Politik dan Hukum Pemilihan Presiden Secara Langsung”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 20, Juni, 2002.

#### **D. Skripsi**

Gito Talibo, 2013, “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (studi di kabupaten Bolaang Monggondow Utara)”, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Makassar.

#### **E. Makalah**

Suci Sundusiah, 2010, *Analisis data Kualitatif*, makalah, Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **F. Paper**

Antonio Spinelli, Managing Elections Under The Covid-19 Pandemic The Republic of Korea’s Crucial Test, Paper, International Institute For democracy and Electoral Assistance, Seoul, Korea Selatan, April, 2020.

Luke Butcher (National Election Commission Of The Republic of Korea), The Effectiveness of Early Voting – A Case Study of The republic

Korea, Paper, ECPR General Conference, Oslo, Norwegia, September, 2017.

Sutisna, “Demokrasi Elektoral dan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Langsung: Tinjauan Teori dan Sisi Gelapnya”, Paper, Political Science Program, Department of Politics and Civics Education, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.

### G. Artikel Internet

\_\_\_\_\_, “Kemendagri: Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Dilaksanakan 2024, Kosisten Sesuai UU Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”, [https://www.merdeka.com/politik/kemendagri-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-dilaksanakan-2024-konsisten-sesuai-uu-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota.html](https://www.merdeka.com/politik/kemendagri-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-dilaksanakan-2024-konsisten-sesuai-uu-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota.html), diakses 4 Maret 2021.

\_\_\_\_\_, “KPU: Jika Pandemi Covid-19 Makin Buruk Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Memungkinkan ditunda”, [https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/11114831/kpu-jika-pandemi-covid-19-makin-buruk-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-memungkinkan-ditunda?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/11114831/kpu-jika-pandemi-covid-19-makin-buruk-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-memungkinkan-ditunda?page=all), diakses 9 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_, “Pemerintah Tolak RUU Pemilu, Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Serentak Tetap 2024”, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210129165446-32-600069/pemerintah-tolak-ruu-pemilu-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-serentak-tetap-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210129165446-32-600069/pemerintah-tolak-ruu-pemilu-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak-tetap-2024), diakses 3 Februari 2021.

\_\_\_\_\_, “Penundaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Tidak Mengganggu”, [https://www.suaramerdeka.com/news/pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota/240584-penundaan-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-tak-mengganggu](https://www.suaramerdeka.com/news/pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota/240584-penundaan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-tak-mengganggu), diakses 9 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_, “Permainan Politik Jadwal Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”, <https://koran.tempo.co/read/editorial/462015/pemainan-politik->

jadwal-pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, diakses 3 Maret 2021.

\_\_\_\_, “Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Serentak 2024 Terlalu Dipaksakan”, [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384039/pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-serentak-2024-terlalu-dipaksakan](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384039/pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak-2024-terlalu-dipaksakan), diakses 3 Maret 2021.

\_\_\_\_, “Pakar: Plt Kepala Daerah Tetap Punya Kewenangan Penuh...”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/17065021/pakar-plt-kepala-daerah-tetap-punya-kewenangan-penuh?page=all>, diakses 20 Maret 2021.

\_\_\_\_, “Zainal Mochtar Soal Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2020: Mau Enggak Orang ke TPS dengan Ancaman Corona?”, [https://kumparan.com/kumparannews/zainal-mochtar-soal-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-2020-mau-enggak-orang-ke-tps-dengan-ancaman-corona-1tdBRBiurQT/full](https://kumparan.com/kumparannews/zainal-mochtar-soal-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-2020-mau-enggak-orang-ke-tps-dengan-ancaman-corona-1tdBRBiurQT/full), diakses pada 9 Oktober 2020.

Andri Jenar, “Komnas HAM Gelar Diskusi Terbuka Kematian Ratusan Petugas KPPS”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/5/21/834/komnas-ham-gelar-diskusi-terbuka-kematian-ratusan-petugas-kpps.html>, diakses 5 Maret 2021.

Bawono Kuromo, “Opini: RUU Pemilu, Pemilu Serentak & Normalisasi Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”, [https://opini.harianjogja.com/read/2021/02/09/543/1063092/opini-ruu-pemilu-pemilu-serentak-normalisasi-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota](https://opini.harianjogja.com/read/2021/02/09/543/1063092/opini-ruu-pemilu-pemilu-serentak-normalisasi-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota), diakses 4 Maret 2021.

Budiarti Utami Putri, “Moeldoko Ungkap Alasan Jokowi Ingin Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Tetap 2024”, [https://nasional.tempo.co/read/1428144/moeldoko-ungkap-alasan-jokowi-ingin-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-tetap-2024/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1428144/moeldoko-ungkap-alasan-jokowi-ingin-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-tetap-2024/full&view=ok), diakses 4 Maret 2021.

Didik Supriyanto, “Cegah Politik Dinasti dengan Pemilu Serentak”, <http://www.kompas.com/read/2013/03/21/02251623/Cegah.Politik.Dinasti.dengan.Pemilu.Serentak>, diakses 1 Januari 2021.

Health, Parma, Medical, “Number of Novel Coronavirus COVID-19 Cumulative Confirmed, Recovered and Death Cases in Hong Kong from January 30 to November 9, 2020”, <https://www.statista.com/statistics/1105425/hong-kong-novel-coronavirus-covid19-confirmed-death-recovered-trend/>, diakses 10 November 2020.

Hendi Purnawan, “Abhan : Anggaran NPHD Tak Bisa Digunakan Untuk Penanganan Covid-19”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/abhan-anggaran-nphd-tak-bisa-digunakan-untuk-penanganan-covid-19>, diakses 2 Februari 2021.

Irfan Fathurohman, “7 Alasan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2002 Jangan Ditunda Versi LSI Denny JA”, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/7-alasan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-2020-jangan-ditunda-versi-lsi-denny-ja>, diakses 3 Februari 2021.

Kementerian Kesehatan RI, “Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging”, <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.X3X-M9ozbIV>, diakses 1 Oktober 2020.

Kementerian Kesehatan RI, “Dashboard Kasus COVID-19 di Indonesia”, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031900002/Dashboard-Data-Kasus-COVID-19-di-Indonesia.html>, pada 1 Oktober 2020, diakses 1 Oktober 2020.

Kementerian Keuangan RI, “APBD Direlokasi Untuk COVID-19, Anggaran Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Minta Ditambah”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbd-direalokasi-untuk-covid-19-anggaran-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-minta-ditambah/>, diakses 2 Februari 2021.

KPU RI, “Tahapan Pemilu 2014”, <https://pemilu2014.kpu.go.id/>, diakses 2 November 2020.

KPU RI, “Tahapan Pemilihan Presiden 2014”, <https://pilpres2014.kpu.go.id/>, diakses 2 November 2020.

Laignee Barron, “Around the World Elections Are Being delayed Because of The Pandemic. Here’s Where Experts Say Hong Kong Went Wrong”, <https://time.com/5877242/coronavirus-elections-postpone-delay-hong-kong-covid19/>, diakses 3 November 2020.

Mela Arnani, “Harapan Penundaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan hak atas Kesehatan yang Harus Jadi Prioritas”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/065744265/harapan-penundaan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-dan-hak-atas-kesehatan-yang-harus-jadi-prioritas?page=all>, diakses 10 Oktober 2020.

Miye S’Oench, Axel Hufford, “How South Korea Conducted Its Election During Pandemic: Comparative Case Study”, <https://www.lawfareblog.com/comparative-case-study-how-south-korea-conducted-its-elections-during-pandemic>, diakses 2 November 2020.

MK RI, “Koalisi Hanya Ingin Satu Pemilu”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12047>, diakses 30 Januari 2021.

Nano Tresna Arfana, “Tiga Pakar Bicara Tentang Pemilu Serentak”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16167>, diakses 9 Oktober 2020.

Perludem, “Perludem: Keputusan Penundaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Bisa Libatkan Satgas”, <http://perludem.org/2020/09/22/perludem-keputusan-penundaan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-bisa-libatkan-satgas/>, diakses Oktober 2020.

Putri Rosmaliya Octaviyani, “Wacana Penundaan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Serentak 2020 Dianggap Tepat”, [https://mediaindonesia.com/read/detail/322985-wacana-penundaan-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-serentak-2024-dianggap-tepat](https://mediaindonesia.com/read/detail/322985-wacana-penundaan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-serentak-2024-dianggap-tepat), diakses 10 Oktober 2020.

Riezky Maulana, “Mahfud MD Kembali Tegaskan Pemerintah Tak Akan Menunda Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2002”, [https://nasional.sindonews.com/read/161692/14/mahfud-md-kembali-tegaskan-pemerintah-tak-akan-menunda-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-2020-1599822544](https://nasional.sindonews.com/read/161692/14/mahfud-md-kembali-tegaskan-pemerintah-tak-akan-menunda-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-2020-1599822544), diakses 3 Februari 2021.

Roshma Widiyani, “Ini Enam Inti Aturan PSBB serta Sanksi di Beberapa Wilayah”, <https://news.detik.com/berita/d-4984195/ini-enam-inti-aturan-psbb-serta-sanksi-di-beberapa-wilayah>, diakses 24 Oktober 2020.

Rumah Pemilu, “Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014”, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>, diakses 14 Oktober 2020.

Satgas Covid-19, “Analisis Data Covid-19 Indonesia Update Per 20 September 2020”, <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-20-september-2020>, diakses 25 Januari 2021.

Tempo.co, “Perludem Papparkan Ruwetnya Pemilu dan Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Jika Digelar 2024”, [http://perludem.org/2021/02/13/perludem-paparkan-ruwetnya-pemilu-dan-pemilihan-gubernur, bupati, dan walikota-jika-digelar-2024/](http://perludem.org/2021/02/13/perludem-paparkan-ruwetnya-pemilu-dan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-jika-digelar-2024/), diakses 5 Maret 2021.

World Health Organization, “Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard”, [https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjw\\_NX7BRA1EiwA2dpg0v4NTDuceSrYNde7lC6mUkhQ7KTyOhxzFkqt4J-PUt1pvo3xPGCSrhoCiflQAvD\\_BwE](https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjw_NX7BRA1EiwA2dpg0v4NTDuceSrYNde7lC6mUkhQ7KTyOhxzFkqt4J-PUt1pvo3xPGCSrhoCiflQAvD_BwE), diakses 1 Oktober 2020.

## **H. Artikel Tertulis**

Azyumardi Azra, “Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Mau ke Mana?”, Kompas, 1 Oktober 2020.

Fernando Cheung, “Why Did Hongkong Delay Its Election- by A Year?” The New York Times, 2 Agustus 2020.

Kenneth Kok La Chan dan Ip Ka Yan, “Nothing To Do With Politics? Seven Flaws In The Decision Cancel Hong Kong’s Legislative Elections”, Hongkong Free Press, 6 September 2020.

## **I. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

## **J. Dokumen Lainnya**

Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02.Kpt/01/KPU/III/2020.

Laporan Singkat Rapat kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Tanggal 3 Juni 2020.

Laporan Singkat Rapat kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI Tanggal 3 Juni 2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Risalah Rapat Komisi II DPR RI Tanggal 11 Februari 2015.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020.